

ARTIKEL

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI SARANA MEMAHAMI
INDONESIA



UNIVERSITAS TERBUKA

NAMA : RAHMA YESSI

NIM : 051564332

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS TERBUKA MEDAN

TAHUN 2023-2024

I. Pendahuluan

Di era dewasa ini yang sangat erat kaitannya dengan globalisasi dan juga banyak perubahan yang sangat dinamis di berbagai bidang kehidupan, bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai persoalan dan tantangan yang hadir baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Permasalahan yang ada secara internal diantaranya adalah semakin mudarnya pilar-pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berhubungan dengan turunnya komitmen terhadap nilai-nilai dasar kehidupan dan norma-norma yang sudah lalu dijadikan

sebagai pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rendahnya komitmen tersebut salah satunya dapat terlihat dari semakin lemahnya pengetahuan wawasan nusantara. Berdasarkan kenyataan yang terjadi di era ini, hal itu menjadi dasar pemikiran dari para akademisi untuk mengajakXrevitalisasi membangun karakter kebangsaan melalui suatu wadah pendidikan sebagai bagian dari upaya membina dan mengembangkan nilai nilai kebangsaan dan karakter kebangsaan (Puskur, 2010) (Suyatno, 2009). Pada lingkup pendidikan tingkat tinggi, telah ditetapkan UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang secara langsung menyebutkan bahwa kurikulum nasional, setiap perguruan tinggi mewajibkan agar memuat mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Agama dan Bahasa Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan saat ini menjadi sangat penting di tengah kondisi kehidupan bangsa Indonesia tanpa bermaksud mengacuhkan urgensi tiga mata kuliah wajiblainnya. Untuk dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman sekarang ini, perlu adanya pengembangan lebih lanjut mengenai substansi kajian yang dapat memungkinkan pelaksanaan perkuliahan. Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagai sarana pembinaan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang sadar dan peduli. Dengan tetap substansi materi Pendidikan Kewarganegaraan tetap mengadakan materi Wawasan nusantara sebagai salah satu topik yang diharapkan dapat memperkuat kesadaran mahasiswa akan pentingnya persatuan Indonesia dan keutuhan NKRI. Pemahaman mengenai wawasan nusantara menjadi salah satu upaya yang Bisa dilakukan untuk membangun rasa dan sikap nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia sebagai dasar untuk menjaga persatuan Indonesia dan keutuhan NKRI.

Pemahaman wawasan nusantara dapat diberikan kepadaXwargaXnegara melalui Berbagai cara, salah satunya adalah melalui pendidikan. melalui pendidikan, pemahaman tentang wawasan nusantara dan sikap nasionalisme berusaha diwujudkan dan diimplementasikan. Upaya tersebut dimanifestasikan ke dalam tujuan pendidikan nasional. Hal ini terbukti dengan tujuan pendidikan yang juga harus dilandasi dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, wawasan nusantara sebagai konsepsi juga dirumuskan sebagai salah satu upaya dalam rangka menumbuhkan dan membentuk karakter kebangsaan generasi muda. Setiawan & Setiawan (2014) memaknai karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang unik tiap individu untuk hidup berkerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat mengambil keputusan dan siap bertanggung jawab setiap akibat dari keputusan yang diambilnya. Terlebih pada era dewasa ini, wawasan nusantara sangat diperlukan dalam rangka menghadapi ancaman dan tantangan sebagai pengaruh dari adanya modernisasi dan globalisasi yang tidak hanya memberikan pengaruh positif, tetapi juga memberi pengaruh yang negatif seperti individualisme, hedonisme, konsumerisme dan westernisasi yang dapat menyebabkan degradasi moral dan mengikis rasa nasionalisme.

II. Kajian pustaka :

Adapun sumber utama dalam pembahasan ini adalah bersumber dari :

Pendidikan Kewarganegaraan, MKDU4111, 3 SKS/MODUL 1-9, Penulis, Prof. Dr. Lasiyo, M.A., MM., Dr. Reno Wikandaru, S.FIL., M.PHIL., Dr. Hastangka, S.FIL., M.PHIL., Universitas Terbuka : Tangerang Selatan, Tahun 2023

III. Pembahasan

A. Pengertian wawasan nusantara

Wawasan nusantara adalah pandangan nasional bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat hidup negara bangsa Indonesia untuk keberlangsungan dan keberhasilan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Setiap bangsa mempunyai cita-cita tertulis maupun tidak tertulis. Cita-cita tersebut sangat penting perannya bagi suatu bangsa karena dapat memberi gairah hidup serta memberi arah dalam penentuan tujuan nasional. Cita-cita bangsa Indonesia sendiri tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kedua. Bangsa Indonesia sadar bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan dalam perjuangan bangsa, melainkan alat untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Berdasarkan cita-cita tersebut, ditentukanlah tujuan nasional bangsa Indonesia yang rumusannya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut, ada tiga faktor penentu yang harus diperhatikan, yaitu faktor geografi, manusia, dan lingkungan.

Terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional bergantung dari bangsa Indonesia memanfaatkan lingkungan geografis, sejarah, dan kondisi sosial-budaya, serta cara pandang masyarakat dalam memandang diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara-lah yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, serta menjadi salah satu sarana dalam pembentukan karakter bangsa.

Kata nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih di kerajaan Majapahit tahun 1336 M, tertulis di dalam Kitab Pararaton. Nusantara pada waktu itu diartikan pulau-pulau di luar Majapahit (Jawa). Dalam Kitab Negarakertagama karangan Empu Tantular, arti nusantara adalah pulau-pulau di luar Jawadengan Majapajit sebagai ibu kotanya. Lalu kata nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Pada acara Kongres Pemuda Indonesia II tahun 1928 (peristiwa sumpah pemuda) digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Basrie turut menambahkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara berpikir, cara bertindak, cara bertingkah laku bangsa Indonesia sebagai interaksi

proses psikologis, sosio-kultural, dengan aspek astagatra (kondisi geografis, kekayaan alam, dan kemampuan penduduk).

Secara keseluruhan, pengertian wawasan Nusantara merupakan “cara pandang” bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Wawasan tersebut merupakan penjabaran dari falsafah bangsa Indonesia sesuai dengan keadaan geografis suatu bangsa sertapernah dialaminya. Esensinya adalah pelaksanaan dari bangsa Indonesia itu sendiri dalam memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, serta kondisi sosial-budayanya dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya.

Dengan demikian, pengertian wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional.

B. Pengertian Wawasan Nusantara Menurut Para Ahli

Untuk lebih memahami makna dari wawasan nusantara, mengutip dari buku Serba-serbi Wawasan Kebangsaan karya Yuniar Mujiwati, berikut pengertian wawasan nusantara menurut para ahli.

1. Prof. Wan Usman Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam Munadjat Danusaputro (1981) Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling terhubung, serta pemekarannya di tengah lingkungan berdasarkan asas nusantara
2. Sumarsono (2002) Wawasan nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara.
3. Samsul Wahidin (2010) Wawasan nusantara memiliki arti cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir dan tingkahlaku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek asta grata. Baca juga: Wawasan Nusantara: Pengertian, Tujuan, Asas, dan Implementasinya
4. Srijanti, Kaelan, dan Achmad Zubaidi (2007) Wawasan nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945, serta sesuai wilayah geografis nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional.

5. M. Panggabean (1979) Wawasan nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, demografi, teknologi dan peluang strategis lainnya.
6. Sabarti Akhadiah MK (1997) Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermanfaat yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa.
7. Lembaga Ketahanan Nasional (1999) Wawasan nusantara sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia dalam memanfaatkan konstelasi geografis Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan segala dorongan dan rangsangan di dalam usaha pencapaian aspirasi bangsa dan kepentingan dan tujuan-tujuan nasional.
8. Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat mencapai tujuan nasional
9. Kelompok Kerja Wawasan Nusantara Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

C. Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan suatu kesatuan cara pandang dan partisipasi aktif bangsa dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia; memberdayakan potensi keanekaragaman nusantara mewujudkan satu perikehidupan bangsa yang berkapasitas, berbhineka dan berjati diri.

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional.

Wawasan nusantara memiliki dua tujuan utama, diantaranya:

Tujuan wawasan nusantara ke Luar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dengan sikap saling menghormati.

Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional yang tertera dalam UUD 1945.

Tujuan wawasan nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin, juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

D. Unsur Dasar Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya merupakan fenomena (gejala) sosial yang dinamis dan memiliki tiga unsur dasar, yaitu wadah, isi, dan tata laku.

a) Wadah

Untuk meninjau konsep wadah, perlu ditinjau pula mengenai asas archipelago, yaitu kumpulan pulau-pulau dan lautan sebagai kesatuan wilayah. Artinya, antara kepulauan dan wilayah perairan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang batas-batasnya ditentukan oleh wilayah laut. Dalam lingkungan tersebut terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau yang menjadi satu kesatuan wilayah.

1) Bentuk Wujud

Bentuk wujudnya berupa kepulauan Nusantara yang memiliki kedudukan geografis yang khas, yaitu yang berada di posisi silang dunia serta memiliki pengaruh besar dalam tata kehidupan dan sifat peri kehidupan nasional. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut meliputi menjadi lalu-lintas aspek-aspek kehidupan sosial dunia, hubungan antarbangsa akan lancar apabila kepentingan nasionalnya terpenuhi atau minimal tidak dirugikan, wilayah Nusantara memiliki kekayaan alam yang melimpah, sumber daya manusia yang melimpah dan murah yang merupakan daya tarik tersendiri bagi negara-negara yang tidak memilikinya.

2) Tata Susunan Pokok/Tata Inti Organisasi

3) Salah satu sarana untuk mengetahui organisasi suatu negara adalah dengan mempelajari UUD-nya. Demikian halnya untuk Indonesia harus dilihat pada UUD 1945. Tata inti organisasi yang dimaksud menyangkut hal-hal berikut ini:

Pertama, bentuk kedaulatan (Bab I Pasal 1) yang meliputi negara kesatuan yang berbentuk republik dan kedaulatan ada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR.

Kedua, kekuasaan pemerintah negara (Bab III Pasal 4-15) yang berkenaan dengan ketentuan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945.

Ketiga, sistem pemerintah negara (penjelasan UUD 1945) yang berkenaan dengan ketentuan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak berdasarkan absolutisme (kekuasaan tidak terbatas), kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR, presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah MPR, presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, dan kekuasaan kepala negara tidak terbatas.

Keempat, sistem perwakilan (Bab VII Pasal 19) yang berkenaan dengan ketentuan bahwa kedudukan DPR kuat, tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR, sehingga dapat senantiasa mengawasi tindakan presiden.

4) Tata Susunan Pelengkap/Kelengkapan Organisasi

Agar tujuan nasional dapat tercapai dengan tertib dan mantap, diperlukan suatu tata kelengkapan organisasi, yaitu aparatur negara harus mampu mendorong, menggerakkan dan mengerahkan usaha-usaha pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan untuk kepentingan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, diperlukan pula kesadaran politik dan kesadaran bernegara dari masyarakat, organisasi negara harus mampu untuk meningkatkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara dari masyarakat, serta menampung aspirasi politik masyarakat, baik sebagai perorangan atau organisasi masyarakat dalam rangka meningkatkan stabilitas politik.

b) Isi

Aspirasi bangsa Indonesia sebagai “isi” dari wawasan Nusantara dapat dirinci menjadi cita-cita proklamasi, asas/sifat dan ciri-ciri, serta cara kerja. Cita-cita yang terkandung di dalam wawasan Nusantara sebagaimana dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Cita-cita wawasan Nusantara itu bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air, mewujudkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Aspirasi bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai kesatuan yang utuh dan menyeluruh memiliki ciri-ciri atau sifat sebagai berikut:

Manunggal, yaitu keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan sesuai makna sesanti “Bhineka Tunggal Ika”.

Utuh-menyeluruh, yaitu bahwa aspirasi bangsa dalam mewujudkan wawasan Nusantara yang utuh dan menyeluruh (komprehensif dan integral) dalam seluruh aspek kehidupan sesuai dengan makna Sumpah Pemuda “Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa”.

Cara kerja bangsa Indonesia untuk mewujudkan wawasan Nusantara berpedoman kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD 1945 yang memberikan arah mengenai pengendalian hidup bermasyarakat serta penetapan hak asasi dan kewajiban bangsa Indonesia.

c) Tata Laku

Tata laku sebagai unsur dari wawasan Nusantara adalah tindakan perilaku bangsa Indonesia dalam melaksanakan aspirasinya guna mewujudkan Indonesia sebagai kesatuan yang utuh dan menyeluruh dalam mencapai tujuan nasional. Tata laku batiniah berwujud pengamalan falsafah Pancasila yang melahirkan sikap mental sesuai kondisi lingkungan hidupnya dalam mewujudkan wawasan Nusantara.

Tata laku batiniah terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya yang merupakan produk dari kebiasaan yang membudaya. Tata laku lahiriah sendiri dituangkan dalam suatu pola tata laku yang dapat diperinci dalam tata-perencanaan, tata-pelaksanaan, dan tata-pengendalian atau pengawasan

E. Konsep Wawasan Nusantara

Secara konsepsional, pengertian wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Perumusan wawasan Nasional bangsa Indonesia – selanjutnya disebut pengertian wawasan Nusantara – merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan yang dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia sendiri didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya.

Menurut Basrie, hal inilah yang menyebabkan wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Suwarsono menambahkan bahwa wawasan Nusantara tidak mengembangkan ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme. Ajaran wawasan Nusantara menyatakan bahwa ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik nasional.

Konsep geopolitik Indonesia berlandaskan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa. Sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah luas dengan berbagai keragaman di dalamnya, Indonesia memiliki wawasan Nusantara yang mengutamakan kepentingan masyarakat dalam aspek sosial, budaya, politik, keamanan, dan ekonomi.

Melalui kesadaran persepsi dan kesepakatan pengembangan kekuatan nasional dalam wawasan Nusantara, diharapkan tercipta keterpaduan sikap dan upaya bangsa Indonesia. Hal inilah yang membuat wawasan Nusantara terus dibina dan

dikembangkan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu mengatasi semua tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang timbul dalam aspek kehidupan.

Pemahaman dan pelaksanaan wawasan Nusantara yang lebih baik dalam ranah kehidupan pribadi maupun wilayah publik sangat menentukan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dibutuhkan kesadaran warga negara dan penyelenggara negara yang memadahi dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut di tengah berbagai masalah yang menghimpit bangsa.

Kesadaran tersebut merupakan bagian integral yang menjamin eksistensi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasional, sekaligus manifestasi cita-cita para leluhur terdahulu dengan tetap menghargai kebhinekaan sebagai anugerah Tuhan dan aset bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut, pemikiran apapun untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang ideal memerlukan kesamaan persepsi, pandangan, dan implementasinya. Konsep wawasan Nusantara memberikan solusi untuk menyamakan pandangan itu. Selain itu, wawasan Nusantara juga dapat digunakan sebagai sarana pembentukan karakter bangsa untuk dapat mewujudkan integrasi nasional seperti yang diharapkan bangsa Indonesia.

F. Wawasan Nusantara dan Karakter Bangsa

Secara konstitusional, wawasan Nusantara dikukuhkan dengan Kepres MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis Besar Haluan Negara Bab II Sub E. Pokok-pokok wawasan Nusantara dinyatakan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional mencakup hal-hal berikut ini:

Pertama, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki arti bahwa kebutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air serta memiliki satu tekad di dalam mencapai cita-cita bangsa.

Kedua, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan sosial dan budaya memiliki arti bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada

hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Ketiga, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki arti bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Selain itu, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya.

Dengan ditetapkannya rumusan wawasan Nusantara sebagai ketetapan MPR, wawasan Nusantara memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua penyelenggara negara, semua lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, serta semua warga negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap rumusan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan nasional harus mencerminkan hakikat rumusan wawasan Nusantara.

G. Wawasan Nusantara dan Integrasi Nasional

Dalam usaha mencapai tujuan nasional masih banyak yang memiliki pandangan atau persepsi yang berbeda-beda. Untuk itulah pemerintah Indonesia mempunyai rumusan dalam konsep pandangan nasional yang komprehensif dan integral dalam bentuk wawasan Nusantara. Wawasan ini akan memberikan konsepsi yang sama pada peserta didik tentang visi ke depan bangsa Indonesia untuk menciptakan kesatuan dan persatuan, sehingga akan menghasilkan integrasi nasional.

Secara teoritis, integrasi dapat dilukiskan sebagai pemilikan perasaan keterikatan pada suatu pranata dalam suatu lingkup teritorial guna memenuhi harapan-harapan yang bergantung secara damai di antara penduduk. Secara etimologis, integrasi berasal dari kata *integrate*, yang berarti memberikan tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Oleh karena itu, pengertian integrasi adalah membuat unsur-unsurnya menjadi satu kesatuan dan utuh.

Integrasi berarti menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat, sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika. Integrasi nasional merupakan hal yang didambakan yang

dapat mengatasi perbedaan suku, ras, dan agama. Kebhinekaan ini merupakan aset bangsa Indonesia apabila diterima secara ikhlas untuk saling menerima dan menghormati dalam wadah NKRI.

Menurut Sartono Kartodirdjo, integrasi nasional berasal dari integrasi teritorial dan merupakan integrasi geopolitik yang dibentuk oleh transportasi, navigasi, dan perdagangan, sehingga terciptalah komunikasi ekonomi, sosial, politik, dan kultur yang semakin luas dan intensif. Pada saat ini, NKRI diperkokoh dengan adanya sistem administrasi yang sentralistik melalui sistem edukasi, militer, dan komunikasi.

Kebijakan kebudayaan dalam konteks integrasi nasional bukan berarti tidak pernah dikenal dalam peta politik di Nusantara. Hal ini dikarenakan pemerintah kolonial Hindia-Belanda tatkala menguatkan kekuasaannya di Nusantara tempo dulu menempatkan semua jabatan di wilayah yang paling rentan dalam kaca mata mereka kepada para ahli-ahli yang tahu tentang masyarakat dan kebudayaan setempat untuk menangani masalah politik dan sosial tanpa menimbulkan pemberontakan bersenjata yang akan mahal harganya untuk ditumpas.

Masyarakat Indonesia sangat heterogen dan pluralistik. Oleh karena itu, bagi integrasi sosial-budaya unsur-unsurnya memerlukan nilai-nilai sebagai orientasi tujuan kolektif bagi interaksi antarunsur. Dalam hubungan ini, ideologi bangsa, nilai nasionalisme, dan kebudayaan nasional memiliki fungsi strategis. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menggantikan nilai-nilai tradisional dan primordial yang tidak relevan dengan masyarakat baru.

Dengan demikian, nilai nasionalisme memiliki nilai ganda, yaitu selain meningkatkan integrasi nasional, juga berfungsi menanggulangi dampak kapitalisme dan globalisasi serta dapat mengatasi segala hambatan ikatan primordial. Primordialisme dan etnosentrisme memang tidak bisa dihapus begitu saja, namun perlu dikembangkan menjadi identitas nasional.

Ada tiga cara yang selalu ditawarkan untuk memperkuat rasa nasionalisme kebangsaan Indonesia sebagai upaya menghindari disintegrasi bangsa, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan, yaitu: melakukan sosialisasi nasionalisme Indonesia secara terus-menerus, meningkatkan pembangunan ekonomi, dan menghilangkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Apabila dipikirkan antara integrasi dan nasionalisme saling terkait. Integrasi memberi sumbangan terhadap nasionalisme dan nasionalisme mendukung

integrasi nasional. Oleh karena itu, integrasi nasional harus terus-menerus dibina dan diperkuat dari waktu ke waktu. Kelalaian terhadap pembinaan integrasi dapat menimbulkan konflik dan disintegrasi bangsa.

Integrasi nasional biasanya dikaitkan dengan pembangunan nasional karena masyarakat Indonesia yang majemuk sangat diperlukan untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan agar pembangunan nasional tidak terkendala. Dalam hal ini, kata-kata kunci yang harus diperhatikan adalah mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis dan saling membantu atau dalam koridor lintas SARA.

Integrasi mengingatkan adanya kekuatan yang menggerakkan setiap individu untuk hidup bersama sebagai bangsa. Dengan integrasi yang tangguh, yang tercermin dari rasa cinta, bangga, hormat, dan loyal kepada negara, maka cita-cita nasionalisme dapat terwujud.

Dalam integrasi nasional, masyarakat termotivasi untuk loyal kepada negara dan bangsa. Di dalamnya terkandung cita-cita untuk menyatukan rakyat mengatasi SARA melalui pembangunan integral. Integrasi nasional yang solid akan memperlancar pembangunan nasional dan pembangunan yang berhasil akan memberikan dampak yang positif terhadap negara dan bangsa sebagai perwujudan nasionalisme.

Dengan berhasilnya pembangunan sebagai wujud nasionalisme, konflik-konflik yang mengarah kepada perpecahan atau disintegrasi dapat diatasi karena integrasi nasional memerlukan kesadaran untuk hidup bersama dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Wawasan Nusantara tidak hanya sebuah konsep tentang cara pandang terhadap bangsanya sendiri, namun juga menyadarkan rakyat bahwa keanekaragaman budaya di antara masyarakat Indonesia berada di dalam satu kebudayaan yang mengikat di dalam sebuah negara yang memiliki arah yang sama yaitu mewujudkan persatuan dan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Secara geografis penduduk Indonesia terpisah dan berkembang menyesuaikan lingkungannya membentuk sebuah kelompok sosial yang memiliki ciri khas masing-masing. Rendahnya pemahaman dasar sebagai warga negara Indonesia menyebabkan etnosentrisme yang dapat mengancam integrasi bangsa.

B. Saran

Oleh karena itu perlu untuk kita kembali mempelajari Wawasan Nusantara. Perlu adanya pendidikan moral, pengembangan wawasan, keterampilan serta penanaman rasa nasionalisme pada generasi muda, karena merekalah tulang punggung negara di masa yang akan datang. Salah satunya melalui penanaman nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila dan semboyan bangsa kita “Bhinneka Tunggal Eka” kepada mereka sehingga mereka kelak ketika mereka menjadi pemimpin, bukan hanya sebagai Ulil Amri atau Umara tetapi juga bersifat Khadimul Ummah (pelayan umat) dalam segala bidang aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa melihat kaya miskin, pejabat atau rakyat, suku, ras, agama atau hal yang lain, karena semua adalah sama dan tetap satu yaitu untuk Indonesia (Najicha, 2017).

V. Daftar Pustaka

Prof. Dr. Lasiyo, M.A., MM., Dr. Reno Wikandaru, S.FIL., M.PHIL., Dr. Hastangka, S.FIL., M.PHIL., *Pendidikan Kewarganegaraan, MKDU4111, 3 SKS/MODUL 1-9*, Universitas Terbuka : Tangerang Selatan, Tahun 2023

Drs. Syamsu Ridhuan, M.Pd., *Modul Pembelajaran Online 6 Wawasan Nusantara E-Learning*, Universitas Esa Unggul Tahun 2009

Sriwidayati, S.Pd., *Wawasan Nusantara*, Alprin. Tahun 2020

<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/>